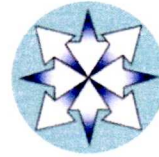




**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



DEWAN PERS

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DAN

DEWAN PERS

TENTANG

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Nomor : 56/PK/2019

Nomor : 07/DP/MoU/IV/2019

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. M. Guntur Hamzah**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Yosep Adi Prasetyo**, Ketua Dewan Pers, berkedudukan di Jl. Kebon Sirih Nomor 32-34, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.
- (2) Kerja sama ini diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Membangun budaya sadar konstitusi;

- c. Menyebarluaskan gagasan dan merespon permasalahan hukum dan konstitusi;
- d. Mendorong berkembangnya budaya berpikir dan menulis ilmiah di kalangan pers;
- e. Meningkatkan kualitas pers nasional;
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum dan konstitusi.

Pasal 2 **LINGKUP KERJASAMA**


Kerja sama ini meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
2. Pengkajian tentang Pancasila dan Konstitusi;
3. Pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi serta penyebarluasan informasi tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Peningkatan kompetensi jurnalis/wartawan guna melahirkan produk jurnalistik yang dapat meningkatkan pemahaman warga negara pada Pendidikan Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
5. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman. 

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Pasal 5
ANALISIS DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.


Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
TINDAK LANJUT

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 

Pasal 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS JENDERAL,





M. Guntur Hamzah

PIHAK KEDUA
KETUA DEWAN PERS,



Yosep Adi Prasetyo
DEWANPERS

MENGETAHUI,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,


Dr. Anwar Usman, S.H., M.H